

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional menurut Robert Jackson dan Georg Sorensen dalam bukunya *“Introduction to International Relations”* bahwa Hubungan Internasional dihubungkan dengan teori dan praktik kenegaraan yang berdaulat. Satu titik fokus ilmiahnya adalah kasus-kasus yang terjadi pada negara-negara dan hubungan antarnegara, namun di sisi lain Hubungan Internasional mencakup hampir semua hal yang berkaitan dengan manusia di seluruh dunia.

Dalam bukunya yang berjudul After Tamerlance: The Global History of Empire, Darwin berusaha menjelaskan bahwa Hubungan Internasional didasarkan pada keyakinan bahwa negara-negara berdaulat dan perkembangannya sangatlah penting bagi pemahaman bagaimana nilai-nilai dasar kehidupan manusia tersedia atau tidak tersedia, bagi masyarakat di seluruh dunia. Pakar tradisional atau pakar Hubungan Internasional klasik umumnya memiliki pandangan negara yang positif yaitu negara itu diperlukan dan diinginkan. Sedangkan pakar revisionis memandang jika Hubungan Internasional lebih negatif yaitu bersifat problematik, bahkan membahayakan (Darwin, 2007).

Kanneth N. Waltz melalui bukunya *Theory of International Politics* mencoba membuat ilmu Hubungan Internasional lebih saintifik dengan cara membangun metode saintifik bagi ilmu Hubungan Internasional dengan mengusulkan:

1. Penelitian Hubungan Internasional harus menemukan dan mengukur hubungan antar variable sebagaimana ilmu ekonomi melakukannya dengan baik.
2. Riset Hubungan Internasional merupakan sarana untuk menguji teori.
3. Dalam situasi anarkis, negara harus mengupayakan kelangsungan hidupnya melalui pembangunan kekuatan militer.
4. Tindakan negara dapat diprediksi dengan melihat pada kekuatan nasionalnya (terutama pada kekuatan ekonomi dan militernya).
5. Perdamaian dapat tercipta apabila terdapat Keseimbangan Kekuasaan (*Balance of Power*) 50:50. (Waltz, 2010)

John Garnett mengkalsifikasikan teori Hubungan Internasional ke dalam “teori ilmiah” dan “teori klasik”. John memaknai teori ilmiah atau *scientific theory* sebagai teori yang mendasarkan diri pada fakta-fakta yang saat ini dapat diamati (*observable facts*). Namun sebagai generalisasi empiris, teori ilmiah tidak ditarik dari kejadian-kejadian historis, melainkan berdasarkan verifikasi yang empiris dan secara ilmiah. Sedangkan teori klasik atau *classical theory* merupakan teori yang mendasarkan diri pada sumber-sumber sejarah dan filsafat. Teori klasik berasumsi bahwa melalui peristiwa-peristiwa sejarah diharapkan dapat ditarik sebuah generalisasi tentang hubungan internasional.

Guna memperdalam penelitian ini, pentingnya ilmu Hubungan Internasional dapat mengambil banyak ide, teori, konsep, dan metodologi dari cabang ilmu lain. Seperti bidang ilmu hubungan internasional yang memiliki topik dengan topik ekonomi, politik luar negeri, dan bidang lainnya, selagi masih

menyangkut dengan topik global yang memiliki hubungan/interaksi yang melintasi batas atau antarnegara. Pada akhirnya dengan menggunakan teori-teori yang ada pada studi Hubungan Internasional, dapat membantu dan mengetahui bagaimana untuk mendeskripsikan dan menjelaskan masalah.

Oleh karena itu, untuk menciptakan keharmonisan universal, Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu yang didirikan di *University of Wales, Aberyswyth*, Inggris pada tahun 1919. Diantara penyebab peperangan modern yang selalu dipelajari adalah Perang Dunia I. Beberapa pihak berpendapat bahwa penyebab perang adalah anarki, yaitu tidak ada pemerintah dunia setelah negara, dan ketidakseimbangan kekuatan dalam sistem internasional. Perlombaan senjata dan negosiasi diplomatik juga merupakan faktor dalam pecahnya perang. Untuk mencegah terulangnya perang besar seperti Perang Dunia I, para pemimpin di Eropa saat itu telah mengusulkan organisasi berkelas dunia yang akan bertindak sebagai media untuk memantau perang antarnegara. Gagasan ini tentunya mengarah kepada pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920.

Filsof Inggris pada abad ke-17 Thomas Hobbes meskipun tinggal diberbagai negara pada waktu yang berbeda, ia menyatakan ide yang sama. Menurut Hobbes, In this short, full of hardship and cruel life... As if everyone is at warfare towards each other (Viotti & Kauppi, 1999).

Ekspresi Hobbes dalam bukunya yang berjudul *The Leviathan* menggambarkan bagaimana konsep pengorbanan diri untuk kehidupan manusia. Dalam hubungan internasional, para filsof awal ini lebih dikenal sebagai sarjana realis kuno. Persamaan pemikiran telah menggabungkan para filsof dengan sifat pesimistis alami dari “insting dan ego manusia yang jahat”. Mereka yang memiliki

kekuasaan seperti raja, akan melakukan tirani kepada orang-orang selama mereka dapat memegang kekuasaan seolah-olah selamanya. Golongan realis menolak moral dan agama dalam hal politik. Mengutip dari pandangan Morgenthau yang menyatakan bahwa suatu negara rentan terhadap bahaya karena para pemimpin nasional sering berpikir dan bertindak sesuai dengan kepentingan kekuasaan saja. Kepentingan ini juga dikenal sebagai kepentingan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan suatu negara. Kekuasaan kemudian didefinisikan sebagai kemampuan material yang dimiliki negara seperti kekuatan militer, kekuatan politik, dan kekuatan ekonomi. Realis lebih lanjut berpendapat bahwa keamanan hanya dapat dicapai dengan mempertahankan kekuatan militer. Adapun pemahaman yang dikenal dengan neorealisme mengasumsikan bahwa perang tidak mungkin dapat dihindari.

2.1.1.1 Teori Neorealisme

Neorealisme yang memiliki arti realisme baru, yang di mana dari kata “neo” berpendapat bahwa terlepas dari manusia atau pemimpin negara, struktur sistem internasional adalah contributor penyebab perang itu sendiri. Dengan kata lain, neorealisme juga dikenal sebagai realisme structural yang mengasumsikan bahwa perang dapat terjadi karena struktur sistem internasional yang tidak memiliki pemerintahan atau anarki. Karena anarki, negara-negara independent melakukan apapun yang mereka inginkan sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Neorealisme memiliki pandangan tidak percaya bahwa negara dapat bekerjasama satu sama lain dengan tulus. Karena negara lebih fokus pada seberapa besar akan mendapatkan manfaat dari setiap kerja sama yang dilakukan dengan negara lain.

Teori Neorealisme menyatakan bahwa yang kuat dan berkuasa akan mendominasi dan memonopoli dunia sedangkan yang tidak punya kuasa akan dengan cepat tersingkirkan.

Teori ini tidak percaya pada konsep kerja sama yang erat antarnegara, melainkan lebih mementingkan keuntungan apa yang diperolehnya, teori neorealisme yang menganut pro-perang (propaganda), karena teori neorealisme lebih didominasi oleh monopoli kekuasaan dengan menghindari kerjasama. Dalam teori neorealisme digambarkan seolah-olah semua negara saling bersaing untuk bertahan hidup. Meskipun perang antarnegara terjadi, maka hal itu dapat dibenarkan dalam teori ini. (Noer, 2022)

Neorealisme juga memiliki pandangan yang sejalan dengan realisme klasik bahwa ciri khas politik internasional adalah adanya upaya negara untuk mencari dan berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Neorealisme menjelaskan kondisi sistem internasional yang berisi upaya *struggle of power* sebagai hasil dari sebuah struktur dominan yang anarkis dengan menunjukkan dinamika relasi antar komponen dalam sistem dengan negara sebagai unit utama, yang masing-masing berupaya untuk bisa selamat dalam kompetisi internasional yang bercirikan pola distribusi kekuasaan khas yaitu kemampuan unit. Neorealisme berfokus pada struktur internasional sebagai arena bagi politik internasional yang memengaruhi perilaku aktor (negara).

Neorealisme menganggap bahwa negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dan menjadi pusat organisasi kekuatan politik yang menjadi dasar hubungan internasional. Aktor-aktor dalam hubungan internasional baik aktor dominan atau negara-negara superpower maupun aktor lainnya berinteraksi dalam struktur yang anarki. Negara sebagai aktor utama bergerak dalam merespons struktur internasional yang anarki. Struktur internasional yang anarki membuat negara menjadi pesimis atau memiliki rasa curiga terhadap negara lainnya (Dharmaputra, 2018).

Dunia adalah tempat yang sangat kompleks, di dalamnya banyak variabel yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Neorealisme pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Hubungan Internasional tersohor, Kenneth Waltz. Pada dasarnya Kenneth Waltz berupaya memberikan penjelasan sistematis tentang apa yang menyebabkan peperangan antarnegara. Neorealisme meyakini bahwa anarki merupakan *enduring future* dalam politik internasional, namun hal tersebut tidak berlaku pada distribusi *power*. Neorealisme menaruh perhatian besar pada *great powers*, karena neorealismelah yang dapat membentuk sistem internasional pada akhirnya.

Dengan demikian, sistem internasional dipengaruhi oleh berapa banyak *great power* yang ada dalam struktur internasional tersebut. Ada 3 jenis distribusi *power* yaitu: 1) unipolaritas (di mana hanya ada 1 *great power*); 2) bipolaritas (di mana ada 2 *great powers*); dan 3) multipolaritas (di mana ada lebih dari 2 *great powers*). Dengan demikian, distribusi *power* ini akan sangat memengaruhi stabilitas sistem internasional. Di dunia unipolar, satu *great power* yang memiliki monopoli *power* yang sangat besar atas negara-negara lain. Kondisi ini menciptakan insentif besar bagi *great power* tersebut untuk memulai penggunaan kekuatan ketika negara lain tidak memenuhi keinginan mereka. Di sisi lain, bipolaritas diyakini paling stabil oleh kelompok neorealis. Dengan adanya 2 *great powers*, hal ini membuat mereka menyadari bahwa biaya perang langsung akan sangat besar karena cenderung adanya distribusi *power* yang sama di antara keduanya. Namun, dalam multipolaritas, *great powers* dapat membentuk aliansi dengan sebagian *great power*

lainnya, namun meninggalkan yang lain untuk mencapai *relative gains*. Hal ini berarti peluang perang yang lebih tinggi.

Bagi neorealis, keamanan adalah tujuan akhir dari semua negara, dan *power* adalah sebagai sarana untuk mencapai di mana tidak ada otoritas global untuk melindungi mereka jika terjadi bahaya. Hal inilah yang mendorong negara untuk mengejar *power*, karena akan membawa setiap negara ke kondisi di mana kelangsungan hidup mereka tidak lagi terlalu terancam. Teori neorealisme adalah penyempurnaan dari teori realisme klasik. Kedua teori ini pada dasarnya memiliki asumsi dasar yang sama, namun memiliki penekanan yang berbeda mengenai *power-politics* antarnegara. Teori neorealisme menjelaskan kenyataan bahwa tidak adanya pemerintahan global (yakni struktur sistem internasional adalah anarkis dan bukan hirarki) yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi negara, mendorong negara untuk berusaha menjamin keamanan mereka sendiri. Hal tersebut dilakukan melalui akumulasi *power*, utamanya *hard power*. Namun, dalam neorealisme terdapat perbedaan mengenai jumlah atau ukuran *power* yang harus dikejar untuk keamanan tersebut. Di satu sisi ada realisme defensif yang menekankan pada akumulasi *power* secara optimal, namun di sisi yang lain ada realisme ofensif yang menekankan.

2.1.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi hubungan internasional. Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang akan mempengaruhi

politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.

Dinamika global yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang menuntut kemampuan negara melihat perkembangan dan menetapkan kebijakan strategi hubungan luar negeri yang tepat, agar mampu berkiprah untuk menarik keuntungan yang maksimal bagi kepentingan nasional suatu negara. Pada satu sisi, politik luar negeri harus mampu dalam mengantisipasi berbagai kecenderungan dan potensi yang terjadi di luar negeri untuk mengamankan kepentingan nasional.

Hadirnya berbagai permasalahan yang terjadi di dalam negeri sebagai alat untuk kepentingan nasional yang diperjuangkan melalui politik luar negeri (Elisabeth, 2016).

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen, yaitu politik dan luar negeri. Politik (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. *Policy* itu sendiri berakar pada konsep “pilihan (*choices*)” atau memilih tindak keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep “wilayah” akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan memiliki arti control atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Maka dari itu politik luar negeri (*foreign policy*)

berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.

Istilah yang dikeluarkan oleh seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, menyatakan bahwa “*foreign policy begins when domestic policy ends*”. Dengan kata lain studi politik luar negeri berada pada *intersection* antara aspek dalam negeri suatu negara (domestik) dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara. Karena itu studi politik luar negeri tidak dapat membuat struktur dan proses baik dari sistem internasional maupun dari sistem politik domestik.

Dalam bukunya, Sukri Tamma memberikan gambaran jika politik luar negeri adalah setiap negara bangsa yang saling bekerja sama dengan kondisi masing-masing negara yang juga beragam maka setiap negara bangsa harus mampu membuat rencana serta strategis yang paling tepat bagi negaranya, dan itu merupakan dasar berinteraksi dalam dunia internasional. Berbagai rencana serta strategi untuk diimplementasikan menjadi landasan dalam dari setiap negara tersebut yang pada akhirnya akan disebut sebagai “kebijakan luar negeri”.

Menurut Charles Hermann, jika kebijakan luar negeri terabaikan maka sebuah negara telah mengabaikan suatu kondisi penting yang menjadi dasar bagi eksistensi suatu negara dalam kehidupan bersama dengan negara lain di dunia. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kebijakan luar negeri merupakan perwujudan dari struktur politik nasional. Dengan demikian politik luar negeri adalah kebijakan yang diambil oleh suatu negara yang merupakan cerminan dari kepentingan nasional negara tersebut (Tamma, 2020).

Dalam buku Pengantar Studi Politik Luar Negeri yang ditulis oleh Asep Setiawan dan Endang Sulastri, Sumpena Prawirasa putra mengemukakan pendapatnya tentang Politik Luar Negeri ialah:

“Kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan khususnya tujuan untuk sesuatu kurun waktu yang sedang dihadapi, lazimnya disebut kepentingan nasional. Pada hakekatnya ia merupakan pola sikap atau respons terhadap lingkungan ekologisnya. Respons tersebut mempunyai latar belakang yang berinteraksi dengan persepsi, pengalaman, kekayaan alam serta kebudayaan politik yang biasanya dimanifestasikan sebagai falsafah bangsa dan diakomodasikan dalam konstitusi.”

Kj Holsti juga memberikan penjelasan yang menarik. Holsti mengatakan jika sebuah negara sudah berinteraksi maka disebutnya sebagai politik internasional. Akan tetapi jika negara sudah melakukan kebijakan terhadap negara lain atau lingkungan internasional maka disitulah porsi studi politik luar negeri (Asep Setiawan, 2017).

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara pada dasarnya memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya, meskipun

kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu tertentu.

Dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerja sama diantaranya adalah kerja sama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral (Jack C. Plano, 1999).

Banyak pakar menulis tentang kebijakan luar negeri diantaranya ialah Lenter, Holsti, Roseanau dan lain-lain. Suatu negara harus membuat keputusan tentang alat yang akan digunakan untuk melaksanakan tindakan kebijakan luar negerinya. KJ Holsti mengkategorikan instrument yang dapat digunakan dalam mencapai atau mempertahankan kebijakan luar negeri ke dalam lima kategori; diplomasi, disinformasi/propaganda, ekonomi, operasi militer, politik. Selain itu dalam tulisan Holsti, pemikiran mengenai *output* politik luar negeri (kebijakan) luar negeri dibagi dalam empat unsur, ruang lingkupnya tersusun mulai dari yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat khusus, diantaranya sebagai berikut:

1. Orientasi atau strategi politik luar negeri.
2. Peranan nasional.
3. Tujuan politik luar negeri.
4. Tindakan. (Holsti, 2016).

Orientasi umum atau sikap umum yang dimaksud memiliki arti bagaimana komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan aspirasi dan internasional. Ekspresi orientasi umum suatu negara terhadap negara di dunia akan dinilai dari bagaimana tingkat keterlibatan suatu negara dalam berbagai dinamika konflik internasional.

Dalam rangka menetapkan politik luar negerinya, setiap negara akan mengaitkan lingkungan domestik dengan situasi internasional yang melingkupi lingkungan domestiknya. Kebijakan luar negeri suatu negara ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara (Ikbar, 2014).

Dapat dikatakan kebijakan luar negeri adalah tindakan yang dilakukan kepada negara lain atau kebijakan yang ditujukan secara langsung ke negara lain, dan memiliki dampak pada negara lain. Namun jika kebijakan yang ditujukan kepada masalah yang secara eksklusif berada dalam kekuasaan hukum negara tersebut, dan tidak memengaruhi negara lain maka kebijakan tersebut didefinisikan sebagai kebijakan. Apa yang dinamakan politik luar negeri dengan kebijakan luar negeri pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Dalam istilah asing *foreign policy* dan tidak pernah menjumpai istilah *foreign politics* sebagai terjemahan politik luar negeri, karena istilah tersebut hanya dijumpai dalam kamus Indonesia saja. Padahal sesungguhnya yang dimaksud ialah *foreign policy* (kebijakan luar negeri).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional atau dalam ungkapan Prancis yaitu *raison d'Etat* adalah tujuan dan ambisi suatu negara, baik ekonomi, militer, atau budaya. Menurut aliran arus utama dalam Studi Hubungan Internasional, konsep ini penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional. Argumentasi Nicolo Machiaveli mengenai kepentingan nasional banyak dirujuk dalam praktik maupun pengembangan teoritis, sebagai pembenaran bagi perilaku internasional negara yang mengabaikan kepentingan utama pada masa purba sebelumnya, yaitu agama

dan moralitas. Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan *power* negara sebagai tujuan maupun instrument, khususnya yang bersifat destruktif (*hard power*).

Ketika kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar power dan power dipergunakan sebagai instrument untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya dalam sistem internasional yang dipersepsikan anarki, kecuali kekuasaannya sendiri adalah sebuah kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang (A Bainus, 2018).

Menurut Hans J. Morgenthau di dalam “*The Concept of Interest defined in Terms of Power*”, konsep kepentingan nasional (*interest*) yang didefinisikan dalam istilah “*power*” di mana berada diantara nalar, akal atau “*reason*” yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Kepentingan nasional memberikan ukuran konsistensi yang diperlukan dalam kebijakan nasional menurut Wulandari pada tahun 2013 di dalam jurnalnya yang berjudul *Hambatan Perdagangan Lintas Batas Antara Masyarakat Indonesia dengan Masyarakat Timur Leste*.

Menurut Anak Agung Banyu Berwita dan Yanyan Mochammad Yani, konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis juga menyampaikan hal serupa, bahwa konsep kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power* atau kekuasaan. Dalam ranah hubungan internasional *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain baik secara individual maupun kolektif.

Kekuasaan atau kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus menjadi tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional (Perwita, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, 2006).

Kepentingan nasional memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan aktualisasi kekuatan atau *power* yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai tujuannya. Dalam pemaknaan klasik, penggunaan *power* dalam konteks pencapaian kepentingan nasional umumnya berkorelasi dengan orientasi kebijakan yang bersifat destruktif. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan *power* mulai digantikan oleh kepentingan nasional yang bersifat kooperatif dan persuasif atau disebut juga sebagai *soft power*. Morgenthau meyakini bahwa negara, sama seperti manusia yang selalu memiliki keinginan untuk mendominasi yang lainnya dan akhirnya menimbulkan konflik dan peperangan.

Secara sederhana, kepentingan nasional ialah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari suatu negara berdaulat dalam kaitannya dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal. Definisi singkat tentang kepentingan nasional ini tidak memberikan pedoman kepada pembuat keputusan untuk membantu mengidentifikasi kepentingan-kepentingan tersebut. Sebagai upaya untuk melakukan hal ini adalah dengan membagi kepentingan nasional suatu negara menjadi empat kebutuhan dasar atau persyaratan yang membentuk dasar-dasar kebijakan luar negerinya, seperti:

1. Kepentingan Pertahanan. Kepentingan pertahanan merupakan perlindungan negara-bangsa dan warganya terhadap ancaman kekerasan fisik yang

diarahkan dari negara lain atau ancaman yang diilhami secara eksternal terhadap sistem pemerintahannya.

2. **Kepentingan Ekonomi.** Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan negara-bangsa dalam hubungan dengan negara-negara lain.
3. **Kepentingan Tatanan Dunia.** Kepentingan tatanan dunia merupakan pemeliharaan politik internasional dan sistem ekonomi di mana negara-bangsa dapat merasa aman, serta warga dan perdagangannya dapat beroperasi secara damai di luar perbatasannya.
4. **Kepentingan Ideologis.** Kepentingan ideologis merupakan perlindungan dan kelanjutan dari serangkaian nilai-nilai masyarakat dari negara-bangsa berbagi dan diyakini baik secara universal (Nuechterlein, 1976).

Negara-negara tentunya sangat memahami pentingnya bersaing untuk mendapatkan kekuasaan atau bahkan hanya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup negaranya. Kepentingan nasional menjadi sebuah konsep utama yang dipakai untuk dapat melihat perilaku rasional negara di ranah internasional. Konsep kepentingan nasional ini telah menjadi sebuah panduan negara dalam melakukan kebijakan luar negerinya masing-masing, sehingga setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya sendiri, seperti pada umumnya kepentingan nasional terdiri dari kepentingan keamanan, ekonomi, dan ideologi bersama. Seperti yang dikatakan oleh Hans Morgenthau konsep kepentingan merupakan substansi politik yang abadi dan tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat dan negara adalah produk historis yang akan terus berubah. Jadi hubungan

antara kepentingan dan negara berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat.

Selama dunia secara politis diorganisasikan ke dalam negara-negara, elemen penting dari kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup negara dalam politik dunia itu sendiri (Lingga, 2022).

2.1.5 Keamanan Internasional

Dalam buku Pengantar Studi Keamanan yang ditulis oleh Yanyan Mochamad Yani dan kawan-kawan mengatakan jika pembahasan konsep keamanan dalam konteks keamanan internasional merupakan suatu pendekatan keamanan tradisional yang aktor utamanya adalah negara. Fokus utama keamanan tradisional ini yakni *national interest* negara dalam bidang pertahanan keamanan. Berikut beberapa asumsi mengenai keamanan internasional:

1. Fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara dan kepentingannya, yaitu mengejar kepentingan-kepentingan kekuasaan.
2. Tidak ada kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan negara.
3. Kepentingan keamanan didefinisikan secara sepihak oleh negara.
4. Kestabilan internasional tergantung pada distribusi kekuatan yang seimbang (*balance of power*).
5. Negara tidak bisa menggantungkan kepentingan keamanannya pada negara lain bahwa *struggle for power* itu bersifat permanen, pemahaman keamanan dari ancaman militer. Hubungan natarnegara bersifat *zero-sum game*, artinya setiap upaya untuk meningkatkan keamanan mempunyai implikasi

negative terhadap negara lain yang mengganggu keseimbangan kekuatan atau yang dikenal sebagai dilemma keamanan (*security dilemma*).

6. Fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara dan kepentingannya, yaitu mengejar kepentingan-kepentingan kekuasaan. (Yanyan Mochamad Yani, 2017)

Isu keamanan internasional senantiasa meramaikan Kajian Hubungan Internasional sebagai salah satu bidang kajian utama, konsep keamanan dalam Kajian Keamanan Internasional mengalami perkembangan geneologis (ilmu tentang keturunan) melalui perdebatan-perdebatan, dari keamanan yang bersifat tradisional (politik-militeristik) sampai non-tradisional (manusiawi dan alternatif) oleh para intelektual Hubungan Internasional. Menurut Arry Bainus dan Junita Budi Rahman dalam bukunya yang berjudul “Keamanan Internasional” mengatakan jika pada pasca Perang Dingin dan Era Berikutnya, paradigma keamanan tradisional tergoyahkan oleh kemunculan fenomena ancaman keamanan lain yang berbeda dan tidak dapat diabaikan.

Fenomena tersebut meliputi: konflik antarnegara, konflik antaretnik, antaragama, dan bahkan perang saudara, kejatuhan ekonomi, dan degradasi lingkungan serta penjaminan terhadap kebebasan dan rasa aman (Rahman, 2017).

Seorang ahli keamanan, Barry Buzan membagi sector keamanan ke dalam lima bidang, yaitu militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial. Pendekatan militer berarti hanya salah satunya dalam sistem keamanan nasional. Peran militer fokus pada kapabilitas lembaga pertahanan, asesmen ancaman dan lainnya. Hubungan sosial budaya dan agama diperlukan untuk memahami dinamika ancaman dan interaksi faktor-faktor keamanan. Selain itu, keamanan tidak dapat

dipahami dalam arti sempit, hanya dari sudut pandang negara, dengan anggapan bahwa bila rakyat sejahtera, maka akan tercipta keamanan.

Tindakan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dikatakan sebagai Security dilemma dimana merupakan Security Dilemma adalah situasi tindakan yang diambil oleh negara untuk meningkatkan keamanan negaranya sendiri menimbulkan reaksi dari negara-negara lain, yang mengakibatkan penurunan ataupun peningkatan keamanan negara. Security Dilemma adalah sumber konflik yang paling sering terjadi dalam hubungan internasional. Seperti diketahui dalam konteks hubungan internasional tidak terdapat lembaga yang berada diatas negara dan sebagai konsekuensinya setiap negara harus menjaga keamanan dan kelangsungan hidupnya sendiri. Karena alasan tersebut meningkatkan keamanan menjadi tujuan utama negara.

Mengurangi keamanan negara lain tidak secara otomatis menempatkan negara dalam dilema, tetapi karena struktur yang anarkis, negara-negara lain akan mengikuti, jika satu negara meningkatkan kapasitas militernya. negara tidak dapat mengetahui apakah negara lain yang meningkatkan kapasitas militernya akan menggunakan untuk melakukan serangan. Karena alasan tersebut negara akan memilih untuk meningkatkan kemampuan militernya sendiri untuk membangun kembali keseimbangan atau bahkan negara akan melancarkan serangan pendahuluan. Jika negara memilih meingkatkan keamanannya, hasilnya mungkin akan terjadi spiral keamanan. Spiral keamanan ialah fenomena aksi-reaksi antara dua negara dalam perlombaan persenjataan dengan masing-masing negara akan menanggapi setiap peningkatan pertahanan oleh negara lain yang menyebabkan

kedua negara meningkatkan kekuatan militer lebih banyak lagi. Sedangkan jika negara memilih untuk melancarkan serangan pendahuluan maka konflik militer akan terjadi (Putri, April 2021).

Dalam buku Pengantar Studi Keamanan yang ditulis oleh Yanyan Mochamad Yani dan Ian Montratama Emil Mahyudin mengatakan jika keamanan regional merupakan suatu kondisi kawasan yang berhubungan dengan perasaan ketakutan yang dipersepsikan oleh negara-negara di dalam kawasan tertentu karena keberadaan ancaman di dalam kawasannya. Hal itu yang membuat keamanan regional merupakan persepsi dari semua negara yang terdapat di dalam kawasannya, di mana masing-masing negara memiliki persepsi, kekuatan, dan kemampuan serta kepentingan nasional yang berbeda-beda.

Dalam konteks Hubungan Internasional, makna regional lebih bersifat adanya hubungan-hubungan antarnegara atau pengelompokan negara-negara karena adanya kesamaan atau keadaan geografis, berdasarkan orientasi politik, ideologi atau aliansinya. Kompleksitas ini dapat dipahami dari perspektif kaum regionalis yang menegaskan bahwa regional adalah locus of conflict and cooperation, dan juga perspektif kaum globalis yang menegaskan bahwa masalah keamanan akan dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti, budaya, transnasional, ekonomi-politik internasional, deterritorialisasi hingga masalah interrelasi yang kompleks (Yanyan Mochamad Yani, 2017).

Barry Buzan termasuk akademisi HI yang menyadari bahwa faktor kedekatan geografis turut berpengaruh dalam struktur keamanan dan interaksi aktor-aktor yang terlibat dengannya. Region atau kawasan memiliki sejumlah ciri dan atribut yang turut membentuk Batasan dan norma perilaku tiap aktor yang membedakan dengan Batasan dan norma di kawasan lainnya. Karenanya Barry

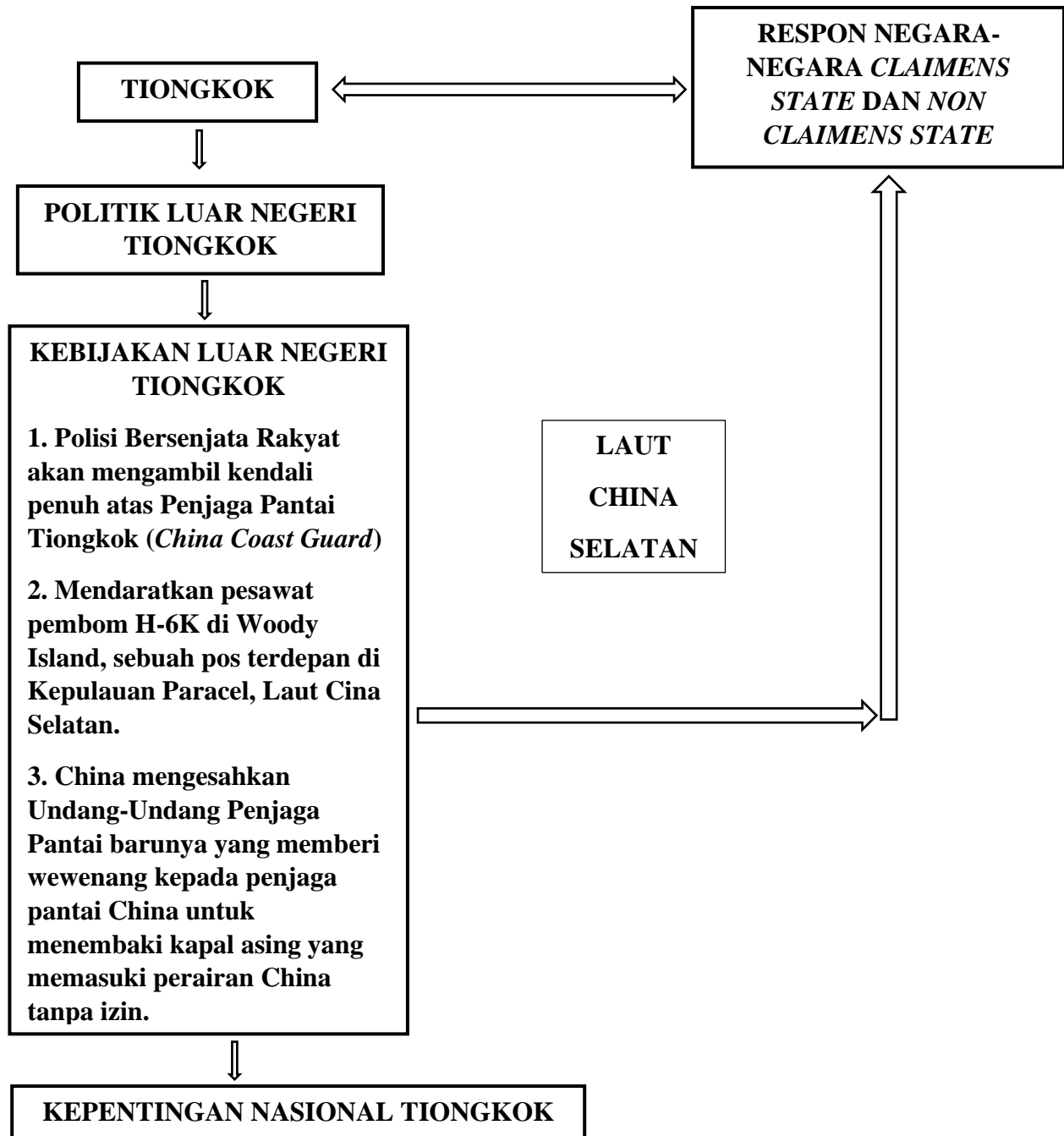
Buzan dianggap logis jika kemudian Buzan menawarkan kerangka analisis keamanan berdasarkan geografis di tingkat regional.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kepentingan nasional yang menjadi formula utama bagi setiap negara untuk membuat sebuah kebijakan luar negeri dan menetapkan bagaimana sistem politik luar negeri yang ditetapkan terhadap negara lain. Pada dasarnya kepentingan nasional didasarkan pada keputusan negara yang didasarkan atas kesejahteraan rakyatnya. Bagaimana kepentingan nasional menjadi titik terang dan sebagai orientasi utama dalam membuat kebijakan luar negeri suatu negara. Tindakan kebijakan luar negeri akan mempengaruhi bagaimana hubungan Tiongkok dengan negara-negara terlibat dalam dinamika konflik Laut China Selatan, baik *claiment state* atau *non claiment state*.

Upaya kebijakan luar negeri Tiongkok sebagai negara *major power* akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap konflik Laut China Selatan nantinya, dan tentu hal itu membuat negara-negara terlibat atau yang juga memiliki klaim atau hanya berdasarkan kepentingan nasional di kawasan LCS yang juga akan memiliki respon terhadap kebijakan Tiongkok dalam konflik. Negara-negara terlibat bersama dengan Tiongkok telah melakukan hubungan bilateral hingga hubungan multilateral kawasan, namun masih belum menemukan titik terang dalam konflik, dalam merespon kebijakan luar negeri Tiongkok di dalam dinamika konflik Laut China Selatan negara-negara Asia Tenggara yang merasa bahwa tindakan Tiongkok yang semakin agresif akhirnya memutuskan untuk melibatkan Amerika

Serikat dan juga organisasi kawasan ASEAN. Hal tersebut mengundang konsep pemikiran mengenai keamanan kawasan atau adanya polarisasi *global power* di kawasan yang melibatkan ASEAN dan juga masuknya intervensi Amerika Serikat. Sehingga penulis memberikan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2 Alur Kerangka Pemikiran

Sumber: Data olahan pribadi